

JEJAK EKONOMI MELAYU PADA PERDAGANGAN MARITIM KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM ABAD KE-17 HINGGA KE-19

Tjik Harun, Holijah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

E-Mail: tjikhharunuin@radenfatah.ac.id holijahuin@radenfatah.ac.id

Abstract: *Palembang, as the seat of power for the Darussalam Sultanate, held a strategic role in the maritime trade routes connecting the East and the West. The Musi River served as the economic lifeline that linked the interior regions of Sumatra with the archipelagic and international waters. The economic values of the Malay community were reflected not only in trade practices but also in port management, commercial systems, and diplomatic relations driven by trade interests. Established in the 17th century, the Palembang Darussalam Sultanate became one of the major hubs in the maritime trade network of Southeast Asia. As an Islamic kingdom influenced by Malay culture, it developed an economic system based on interregional trade, riverine and maritime navigation, as well as the management of local resources. This article aims to examine the economic dynamics of the Palembang Sultanate through a historical approach, focusing on the contributions of the Malay community in developing maritime trade from the 17th to the 19th centuries. The findings reveal that the Malay economic legacy within the maritime trade structure of the Palembang Darussalam Sultanate during the 17th to 19th centuries demonstrates an integration of Islamic values, local culture, and economic strategies that were adaptive to regional dynamics. The trade system developed was not solely driven by material gain but also emphasized principles of justice, deliberation, and social sustainability. Key commodities such as pepper, dammar resin, and rattan symbolized the strength of local production connected to international networks, while the ports along the Musi River functioned as commercial nodes efficiently managed by the sultanate's authorities..*

Keywords: *Malay Economy, Maritime Trade, Palembang Sultanate.*

Abstrak: Palembang sebagai pusat kekuasaan Kesultanan Darussalam memiliki peran strategis dalam lintasan perdagangan laut antara Timur dan Barat. Sungai Musi menjadi urat nadi pergerakan ekonomi yang menghubungkan pedalaman Sumatera dengan perairan Nusantara dan internasional. Nilai-nilai ekonomi masyarakat Melayu tidak hanya tercermin dalam praktik jual beli, tetapi juga dalam tata kelola pelabuhan, sistem niaga, serta hubungan diplomatik berbasis kepentingan dagang. Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri sejak abad ke-17 menjadi salah satu poros utama dalam jaringan perdagangan maritim di wilayah Asia Tenggara. Sebagai kerajaan bercorak Islam yang dipengaruhi budaya

Melayu, Kesultanan ini mengembangkan sistem ekonomi yang bersandar pada aktivitas perdagangan antarwilayah, pelayaran sungai dan laut, serta pengelolaan sumber daya lokal. Artikel ini bertujuan mengkaji dinamika ekonomi Kesultanan Palembang melalui pendekatan historis, dengan fokus pada kontribusi masyarakat Melayu dalam mengembangkan perdagangan maritim dari abad ke-17 hingga ke-19. Temuan menunjukkan bahwa Jejak ekonomi Melayu dalam struktur perdagangan maritim Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17 hingga ke-19 menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan strategi ekonomi yang adaptif terhadap dinamika regional. Sistem perdagangan yang dikembangkan tidak hanya berbasis pada keuntungan material semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan keberlanjutan sosial. Komoditas unggulan seperti lada, damar, dan rotan menjadi simbol dari kekuatan produksi lokal yang terhubung dengan jaringan internasional, sementara pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Sungai Musi berfungsi sebagai simpul perniagaan yang dikelola secara efisien oleh aparatur kesultanan.

Kata Kunci: Ekonomi Melayu, Perdagangan Maritim., Kesultanan Palembang.

PENDAHULUAN

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu entitas politik dan ekonomi yang memainkan peran signifikan dalam jaringan perdagangan maritim di Asia Tenggara pada abad ke-17 hingga ke-19. Terletak di tepi Sungai Musi yang strategis, Palembang menjadi simpul penting dalam sirkulasi komoditas antara pedalaman Sumatera dan pasar global. Peranan Kesultanan dalam jalur niaga ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu di Palembang telah lama terlibat dalam aktivitas ekonomi yang kompleks dan terorganisir. (Najib,2020)

Seiring perkembangan Islam di wilayah ini, sistem ekonomi Palembang berkembang dengan fondasi nilai-nilai keislaman yang berpadu dengan adat istiadat Melayu. Transaksi dagang tidak hanya dilakukan atas dasar keuntungan semata, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Perpaduan antara unsur keislaman dan kearifan lokal ini menciptakan sistem perdagangan yang unik dan bertahan lama.

Selain memiliki lokasi geografis yang strategis, Kesultanan Palembang juga dikenal dengan hasil bumi yang melimpah, terutama komoditas ekspor seperti lada, damar, rotan, dan timah. Komoditas-komoditas ini sangat diminati di pasar internasional, menjadikan Palembang sebagai pusat pengumpulan dan distribusi

hasil alam dari pedalaman Sumatera untuk diperdagangkan ke wilayah seperti Malaka, India, dan Tiongkok. (Azyumardi,2019)

Pelabuhan-pelabuhan yang terletak di Palembang, khususnya yang berada di sepanjang aliran Sungai Musi, memiliki peran yang sangat penting dan multifungsi. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, pelabuhan-pelabuhan ini juga menjadi lokasi strategis di mana berbagai kebudayaan dan etnis para pedagang saling bertemu dan berinteraksi. Para pedagang ini berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menjadikan pelabuhan sebagai pusat kegiatan perdagangan yang dinamis.

Interaksi yang terjadi dalam konteks perdagangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengayaan budaya lokal. Pertukaran ide, tradisi, dan praktik budaya antara berbagai etnis dan kebudayaan yang beragam telah memperkuat identitas maritim masyarakat Melayu Palembang. Dengan demikian, pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai budaya dan identitas, sekaligus menjadi saksi bisu dari perkembangan sejarah dan dinamika sosial yang terjadi di wilayah tersebut.

Struktur perdagangan yang dibangun oleh Kesultanan mencakup sistem regulasi yang ketat terhadap lalu lintas kapal, pungutan pajak, dan pengawasan terhadap transaksi ekonomi. Sultan sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pasar dan memastikan jalannya perdagangan yang adil. Sistem ini memperlihatkan tingkat kelembagaan ekonomi yang tinggi pada masa tersebut. (Sartono,1984)

Perdagangan maritim telah berfungsi sebagai alat diplomasi bagi Kesultanan Palembang dalam menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga serta kekuatan asing seperti Belanda, Inggris, dan negara-negara Arab. Hubungan dagang yang terjalin tidak hanya melalui kesepakatan formal, tetapi juga melalui interaksi budaya yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya memperkuat posisi politik Palembang di tingkat regional. Namun, kehadiran kekuatan kolonial, terutama Belanda yang diwakili oleh Vereenigde Oostindische

Compagnie (VOC), secara bertahap mengikis kemandirian ekonomi yang selama ini dimiliki oleh Kesultanan. Dengan penerapan sistem monopoli dalam perdagangan, pelarangan terhadap ekspor yang bebas, serta penguasaan pelabuhan-pelabuhan yang memiliki nilai strategis, Kesultanan Palembang kehilangan sebagian besar kontrol yang sebelumnya dimilikinya atas aktivitas perdagangan maritim. Meskipun demikian, masyarakat Melayu Palembang tetap berupaya untuk mempertahankan praktik-praktik perdagangan tradisional mereka, baik melalui jaringan informal maupun pasar rakyat yang tersebar di wilayah pedalaman dan pesisir. Kegiatan perdagangan ini bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi ekonomi yang diterapkan oleh kekuatan kolonial.

Studi mengenai jejak ekonomi masyarakat Melayu di Kesultanan Palembang memiliki peranan yang sangat krusial, tidak hanya dalam upaya untuk memahami dinamika ekonomi yang terjadi di tingkat lokal pada masa lalu, tetapi juga memberikan wawasan dan inspirasi yang berharga dalam merancang sistem ekonomi yang berlandaskan budaya serta nilai-nilai spiritual di era modern ini. Sejarah menunjukkan bahwa adanya integrasi yang harmonis antara aspek-aspek agama, budaya, dan aktivitas perdagangan dapat menghasilkan stabilitas ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya relevan untuk kepentingan akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi saat ini. Dengan memahami bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain, kita dapat mengembangkan model ekonomi yang lebih baik, yang tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat.

Dengan melihat lebih dalam dinamika perdagangan maritim Kesultanan Palembang Darussalam, kita dapat menelusuri bagaimana nilai-nilai ekonomi Melayu berperan aktif dalam membentuk jejaring niaga regional yang berpengaruh luas. Kajian ini sekaligus memperkaya pemahaman tentang kontribusi lokal dalam sejarah ekonomi Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode historis dipilih karena objek kajian berupa peristiwa masa lampau yang memerlukan rekonstruksi sistematis berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai Ekonomi Melayu pada Perdagangan Maritim Kesultanan Palembang Darussalam Abad ke-17 hingga ke-19 melalui interpretasi dan analisis terhadap data-data historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesultanan Palembang Darussalam tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh di Sumatera bagian selatan berkat posisinya yang strategis di sepanjang Sungai Musi, yang berperan sebagai jalur utama mobilitas barang dan manusia. Kondisi geografis ini mendorong aktivitas perdagangan maritim yang intens, menghubungkan wilayah pedalaman dengan pasar internasional di Asia, Arab, dan Eropa. (Leonard,2008)

Masyarakat Melayu yang mendominasi struktur sosial dan budaya Palembang mengembangkan sistem niaga berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk etika dagang, tetapi juga menjadi pedoman dalam merancang regulasi perdagangan dan peran negara dalam perekonomian. (Taufik,2005)

Dalam praktiknya, aktivitas perdagangan tidak terlepas dari institusi keagamaan yang turut mengatur transaksi agar sesuai dengan syariat, termasuk dalam penerapan akad dan larangan riba. Komoditas utama seperti lada, rotan, damar, dan hasil hutan lainnya menjadi andalan ekspor yang memperkuat posisi Palembang dalam rantai pasok regional. Lada, misalnya, sangat diminati pasar dunia karena kualitasnya yang tinggi dan menjadi komoditas strategis yang menentukan daya tawar Palembang terhadap kekuatan asing. (Anthony,1988)

Distribusi komoditas yang dimaksud diatur dengan baik melalui pelabuhan-pelabuhan besar, seperti pelabuhan yang terletak di Sungai Musi serta berbagai sungai cabang yang berfungsi menghubungkan daerah-daerah penghasil dengan

jalur-jalur ekspor yang ada. Pengelolaan pelabuhan-pelabuhan ini dilakukan secara sistematis oleh aparat yang ditunjuk oleh kesultanan, yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan tarif, menjaga keamanan, serta mengatur aliran logistik dan proses perizinan yang diperlukan. Dalam hal ini, Sultan sebagai pemimpin tertinggi memiliki wewenang untuk memberikan izin terkait pelayaran dan kegiatan perdagangan, baik kepada mitra lokal maupun pihak asing yang ingin bertransaksi. Selain itu, struktur perdagangan yang ada dalam kesultanan juga melibatkan berbagai sistem perantara dagang, seperti para juragan, yang berperan penting sebagai penghubung antara para pedagang dan pemerintah, sehingga memastikan kelancaran proses perdagangan yang berlangsung.

Hubungan antara pedagang lokal dan internasional dibangun atas dasar kepercayaan dan keberlangsungan, mencerminkan jaringan niaga yang stabil dan berjangka panjang. Jejak keterlibatan pedagang Arab, Tionghoa, dan India dalam aktivitas ekonomi Palembang menunjukkan tingginya intensitas pertemuan antarbudaya melalui perdagangan. Dalam konteks ini, perdagangan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga pertukaran teknologi, bahasa, dan praktik keagamaan. (Sartono, 1984)

Kesultanan memanfaatkan aktivitas ekonomi ini untuk memperkuat basis kekuasaan dan memperluas pengaruh politik ke daerah-daerah sekitar. Strategi ekonomi kesultanan tampak dalam kebijakan monopoli dan pengawasan terhadap komoditas strategis, seperti kontrol atas harga dan jumlah ekspor. Monopoli ini bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri dan menjaga kestabilan pendapatan negara.

Dalam hal diplomasi dagang, Palembang membangun hubungan bilateral dengan kesultanan lain seperti Johor dan Aceh melalui perjanjian niaga dan pertukaran utusan. Bentuk diplomasi ini menekankan prinsip saling menguntungkan dan menjaga akses terhadap jalur laut yang bebas dari ancaman perompak atau kekuatan kolonial. Meskipun demikian, ekspansi kolonial Eropa mulai mengancam kebebasan ekonomi Kesultanan, khususnya sejak kemunculan VOC di wilayah perairan Nusantara. VOC secara bertahap memaksakan kontrol atas ekspor-impor Palembang, memonopoli perdagangan lada dan mengurangi kedaulatan ekonomi

lokal. Penolakan Kesultanan terhadap dominasi VOC sempat memicu konflik, namun pada akhirnya kekuatan militer dan tekanan diplomatik VOC mengikis peran strategis Palembang. (Bambang,2013)

Sistem ekonomi tradisional mulai melemah ketika pelabuhan-pelabuhan utama dikuasai dan diberlakukan tarif yang menguntungkan kepentingan kolonial. Praktik dagang lokal pun mengalami perubahan, dengan tergesernya pedagang Melayu oleh pedagang-pedagang Eropa dan Tionghoa yang mendapatkan perlakuan khusus. Meskipun terdesak, pedagang pribumi tetap bertahan melalui pasar rakyat dan perdagangan sungai yang berlangsung di luar kontrol langsung kolonial.²⁵

Dalam kondisi demikian, warisan nilai-nilai ekonomi Melayu tetap hidup, terlihat dari praktik dagang yang mengutamakan musyawarah, amanah, dan kesetaraan dalam interaksi ekonomi. Pengetahuan lokal seperti cara pelayaran, pengolahan hasil hutan, dan teknik negosiasi menjadi bentuk kemandirian ekonomi yang tidak sepenuhnya dapat dimatikan oleh kolonialisme. Di sisi lain, sistem pelatihan ekonomi berbasis keluarga dan komunitas mencerminkan model ekonomi partisipatif yang menyatu dengan budaya lokal.

Semua ini menunjukkan bahwa perdagangan maritim dalam perspektif ekonomi Melayu tidak sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga ruang pelestarian identitas dan martabat kolektif. Oleh karena itu, memahami jejak ekonomi Melayu di Kesultanan Palembang memberikan kontribusi besar dalam membangun narasi sejarah ekonomi yang berakar pada kekuatan lokal.

KESIMPULAN

Jejak ekonomi Melayu dalam struktur perdagangan maritim Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17 hingga ke-19 menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan strategi ekonomi yang adaptif terhadap dinamika regional. Sistem perdagangan yang dikembangkan tidak hanya berbasis pada keuntungan material semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan keberlanjutan sosial. Komoditas unggulan seperti lada, damar, dan rotan menjadi simbol dari kekuatan produksi lokal yang terhubung

dengan jaringan internasional, sementara pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Sungai Musi berfungsi sebagai simpul perniagaan yang dikelola secara efisien oleh aparat kesultanan.

Meskipun menghadapi tekanan kolonialisme dan dominasi ekonomi oleh VOC pada abad ke-19, masyarakat Melayu Palembang tetap mempertahankan identitas ekonominya melalui mekanisme dagang tradisional dan pasar rakyat. Praktik-praktik ini menjadi bukti bahwa warisan ekonomi Kesultanan Palembang bukan hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan ketahanan budaya dan spiritual dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, kajian atas ekonomi maritim Kesultanan Palembang tidak hanya relevan sebagai bagian dari sejarah lokal, melainkan juga menjadi inspirasi dalam membangun sistem ekonomi berbasis nilai dan kemandirian pada masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2005.
- Andaya, Leonard Y. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2019.
- Burhani, Ahmad Najib. *Kesultanan Islam di Nusantara: Sejarah, Budaya, dan Politik*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2020.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2015.

- Purwanto, Bambang. *Ekonomi dan Institusi: Perdagangan di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680*. New Haven: Yale University Press, 1988.